



TANGANI TPST PIYUNGAN

Tidak Cukup dengan Satu Solusi

YOGYA (KR) - Penanganan sampah masih menjadi permasalahan serius di DIY. Apalagi kondisi Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan yang terus dipaksakan menerima pasokan sampah, meski daya tampungnya sudah melebihi kapasitas.

Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudianta mengatakan, harus ada solusi alternatif dalam menangani TPST Piyungan. Jangan sekadar menggantung proses Kerja Sama Pemintah dan Badan Usaha (KPBU) yang panjang. Jika ada masalah di TPST Piyungan, solusi selama ini hanya membuka tutup pelayanan saja. Apalagi saat ini

jan deras, biasanya muncul masalah lagi.

"Padahal tutup sehari saja, sudah sangat mengganggu masyarakat. Terutama bagi warga di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman yang memang membuang sampahnya ke sana (TPST Piyungan, red)," katanya. Kamis (11/3).

Pemusnahan sampah dengan teknologi, menurut

Huda adalah salah satu teknologi yang dapat dilakukan saat ini. DIY dapat belajar dari daerah lain di Indonesia yang sukses dalam mengelola sampah. Di sisi lain, mencari rekanan untuk mengerjakan pemusnahan sampah prosesnya sangat rumit. Apalagi dengan menggunakan metode KPBU yang sebenarnya sudah dimulai sejak 2018/2019 lalu. Tapi sampai saat ini belum ketemu rekanan yang mau mengelola.

"Informasinya masih *review* studi di Bappenas. Jika lancar, tahun depan baru ketemu rekanan. Jika ada kendala, tidak tahu

sampai kapan tanpa ada kepastian. Hal ini karena ditawarkan siapa rekanan yang mau kerja sama secara usaha dan ambil keuntungan dari pengolahan sampah. Jadi mengolah sampah dianggap sebagai komoditas yang menguntungkan dan ditawarkan ke rekanan. Masalahnya KPBU di Indonesia sangat sedikit yang sudah jalan dan sukses," urainya.

Huda mencontohkan, Pelabuhan Tanjung Adikarto juga tadinya KPBU sekarang mau ditangani pusat. Dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Kemitraan dan Investasi. Arti-

nya, tidak jelas KPBU nya sukses apa tidak.

"Dalam pandangan saya, ada kemiripan antara Tanjung Adikarto dan TPST Piyungan. Sama-sama sulit dikerjakan secara bisnis. Apalagi regulasi tentang sampah luar biasa rumitnya. Semakin membuat investor sulit tertarik. Misal dijadikan listrik dan dijual energi ke PLN, regulasi luar biasa rumit harga DIY tidak menguntungkan dan semacamnya. Kalau nanti ada yang investasi jika ujung-ujungnya APBD harus mensupport rutin tahunan juga jadi masalah baru lagi," jelasnya. (Awh)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005